

## KOLABORASI DINAS PARIWISATA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI CARITA

Oleh :

Darji Supriadi<sup>1)</sup> Arif Nugroho<sup>2)</sup>

[ziekamilanisti@gmail.com](mailto:ziekamilanisti@gmail.com)<sup>1)</sup> [ariyul88@gmail.com](mailto:ariyul88@gmail.com)<sup>2)</sup>

Prodi Administrasi Publik, Institut Kemandirian Nusantara

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang dan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata Pantai Carita. Pantai Carita merupakan salah satu destinasi unggulan di Provinsi Banten yang memiliki potensi wisata bahari yang besar. Namun, pengelolaan wisata di kawasan ini belum menunjukkan hasil optimal, ditandai dengan fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dan belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, pelaku usaha lokal, tokoh masyarakat, dan pengelola wisata di sekitar Pantai Carita. Teori utama yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya partisipasi, kepercayaan, dan forum dialog dalam kolaborasi lintas aktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi yang terjalin masih bersifat sementara dan belum terstruktur secara kelembagaan. Peran Dinas Pariwisata cenderung dominan dalam pengambilan keputusan, sementara partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek operasional. Hambatan utama dalam kolaborasi meliputi kurangnya komunikasi yang berkelanjutan, rendahnya kapasitas masyarakat, dan belum adanya forum koordinasi tetap. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk penguatan kolaborasi melalui pembentukan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes wisata, serta optimalisasi promosi berbasis komunitas.

Kata Kunci: kolaborasi, pariwisata, masyarakat lokal, Pantai Carita, governance

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the collaboration between the Tourism Office of Pandeglang Regency and the local community in the development of Carita Beach tourism. Carita Beach is one of the leading tourist destinations in Banten Province, offering considerable marine tourism potential. However, the management of this destination has yet to achieve optimal results, as indicated by fluctuating visitor numbers and uneven economic benefits for local residents.*

*This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants included representatives from the Tourism Office, local business actors, community leaders, and tourism managers. The theoretical framework is based on Collaborative Governance by Ansell and Gash (2008), which emphasizes participation, trust, and shared decision-making among stakeholders.*

*The findings reveal that the existing collaboration remains informal and lacks institutional structure. The Tourism Office plays a dominant role in decision-making, while community involvement is still limited to operational aspects. Major obstacles include the absence of consistent communication forums, limited community capacity, and the lack of a permanent coordination mechanism. Nonetheless, there are opportunities to strengthen collaboration through the establishment of local institutions such as tourism-aware groups (Pokdarwis) and village-owned enterprises (BUMDes), as well as the use of community-based digital promotion.*

**Keywords:** collaboration, tourism development, local community, Carita Beach, governance

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi alam dan budaya yang kaya. Kabupaten Pandeglang, yang terletak di Provinsi Banten, memiliki banyak destinasi wisata unggulan, salah satunya adalah Pantai Carita. Pantai ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki daya tarik berupa keindahan alam, ombak yang bersahabat, serta akses yang relatif mudah dijangkau dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Serang.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan wisata Pantai Carita belum berjalan secara optimal. Banyak persoalan seperti kurangnya pengelolaan profesional, terbatasnya promosi, rendahnya partisipasi masyarakat lokal, dan lemahnya kolaborasi antar pihak yang berkepentingan. Dalam konteks inilah, kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan masyarakat lokal menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.

Menurut (Emerson, 2012), “kolaborasi pemerintahan adalah proses dan struktur yang memungkinkan para aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama secara konstruktif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan saling terkait.” Kolaborasi semacam ini bukan hanya tentang pembagian peran, tetapi juga berbicara tentang saling percaya, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.

Dinas Pariwisata memiliki peran sentral dalam membangun kebijakan, menyediakan fasilitas, dan memfasilitasi promosi wisata. Di sisi lain, masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan utama yang tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana langsung kegiatan wisata. Menurut (Suansri, 2003), “pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian destinasi wisata.”

Dalam pengembangan wisata Pantai Carita, penting untuk membangun pola hubungan yang sinergis antara Dinas Pariwisata dan masyarakat. Kolaborasi yang baik dapat mendorong inovasi, menciptakan produk wisata berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sayangnya, hingga saat ini pola kolaboratif tersebut masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi koordinasi, keterbukaan informasi, hingga kurangnya kapasitas SDM lokal dalam bidang kepariwisataan.

Melihat pentingnya peran kolaborasi dalam pengembangan pariwisata, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang dan masyarakat lokal dalam upaya mengembangkan destinasi wisata Pantai Carita. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan partisipatif.

Meskipun Pantai Carita memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Pandeglang, namun hingga kini pemanfaatan dan pengembangannya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya fasilitas penunjang wisata, rendahnya kualitas pelayanan, serta belum adanya program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya pengembangan wisata ini adalah lemahnya kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat lokal. Peran Dinas Pariwisata seringkali bersifat top-down,

---

hanya terfokus pada pembangunan fisik dan promosi, tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan maupun pengelolaan destinasi. Di sisi lain, masyarakat lokal belum sepenuhnya memahami potensi ekonominya sendiri melalui pariwisata, dan masih minim keterampilan dalam mengelola usaha wisata secara mandiri.

Menurut (Arnstein, 1969) dalam teorinya tentang *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat simbolik, di mana mereka hanya dijadikan objek pelaksana tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini juga terlihat di Pantai Carita, di mana kegiatan wisata dikuasai oleh pelaku eksternal, sementara masyarakat sekitar belum menjadi subjek utama dalam pengelolaan potensi wisata. Tidak adanya forum komunikasi atau kelembagaan kolaboratif yang mapan antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri. Kolaborasi yang seharusnya menciptakan sinergi antara berbagai pihak, justru terhambat oleh minimnya transparansi informasi, ego sektoral, serta belum adanya pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena tanpa kolaborasi yang efektif, pengembangan wisata Pantai Carita tidak hanya kehilangan potensi ekonominya, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk kolaborasi yang telah terjalin antara Dinas Pariwisata dan masyarakat, serta kendala dan peluang yang muncul dalam upaya pengembangan wisata secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pantai Carita merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Keindahan pantainya, letaknya yang strategis, dan aksesibilitas yang mudah dari Jakarta menjadikan kawasan ini memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata bahari. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Data dari Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) dan Balawista menunjukkan bahwa selama libur Lebaran 1445 H (10–14 April 2024), jumlah wisatawan yang mengunjungi Pantai Carita mencapai lebih dari 50.000 orang. Polda Banten mencatat total kunjungan ke kawasan Anyer-Carita sebesar 62.226 wisatawan, dengan rata-rata tingkat hunian hotel mencapai 74%. Angka ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari wisatawan dalam momen tertentu seperti Lebaran. Namun, ironisnya, kunjungan wisatawan menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam. Pada masa liburan Natal 2024, misalnya, kunjungan ke Pantai Carita hanya mencapai 10% dari jumlah tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi keberlanjutan dan promosi yang tidak merata sepanjang tahun. Bahkan, pengelola Pantai Pasir Putih Carita menyebutkan bahwa meskipun masih ramai, terjadi penurunan kunjungan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya (Sumber: RadarBanten.co.id, 15 April 2024).

Secara keseluruhan, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang mencatat bahwa selama masa libur Lebaran tersebut, terdapat lebih dari 450.000 wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Pandeglang, dengan perputaran uang yang dihasilkan mencapai sekitar Rp 50 miliar. Namun demikian, rata-rata lama tinggal wisatawan di kawasan wisata Pandeglang, termasuk Pantai Carita, masih rendah, yaitu hanya 1,4 hari. Durasi yang pendek ini menandakan bahwa wisatawan cenderung datang hanya untuk kunjungan singkat tanpa menginap, yang berdampak pada terbatasnya nilai ekonomi yang bisa diserap masyarakat lokal (sumber: radarbanten.co.id, 15 April 2024).

Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Pantai Carita belum sepenuhnya dikelola dengan pendekatan partisipatif. Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat masih bersifat parsial dan kurang terstruktur. Dinas Pariwisata cenderung memfokuskan perhatian pada kegiatan fisik dan promosi sesaat, sementara pemberdayaan masyarakat belum menjadi bagian integral dari strategi pengembangan.

Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan juga menjadi penyebab belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan kritik Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation*, bahwa banyak bentuk partisipasi masyarakat yang hanya bersifat simbolik tanpa pelibatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana bentuk kolaborasi yang telah dan sedang berlangsung, serta bagaimana peran aktif masyarakat dapat diperkuat untuk mendukung pengembangan Pantai Carita sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pantai Carita**

Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang memiliki tanggung jawab utama dalam pengembangan destinasi wisata di wilayahnya, termasuk Pantai Carita. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, peran Dinas Pariwisata terlihat dalam beberapa aspek, yaitu: perencanaan program, penyediaan infrastruktur pendukung, promosi wisata, serta fasilitasi kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Namun, peran tersebut masih cenderung bersifat top-down. Banyak program yang dirancang tidak melalui proses konsultasi mendalam dengan masyarakat lokal, sehingga kerap kali kurang menyentuh kebutuhan dan potensi aktual di lapangan. Contohnya, meskipun telah dilakukan promosi melalui media sosial dan event daerah, belum ada pelibatan langsung kelompok masyarakat atau pelaku wisata lokal dalam perancangan konten maupun kegiatan promosi tersebut.

Padahal menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dalam kerangka *collaborative governance*, pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan publik. Artinya, Dinas Pariwisata perlu lebih membuka ruang dialog, mendorong peran aktif komunitas lokal,

serta membangun kelembagaan kolaboratif agar pengembangan wisata tidak hanya dikelola pemerintah secara sepikak.

### **Peran dan Partisipasi Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal di sekitar Pantai Carita memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan wisata, baik sebagai pelaku usaha (homestay, kuliner, jasa sewa perahu), pengelola kebersihan lingkungan, hingga penjaga keamanan wisatawan. Namun demikian, partisipasi mereka sebagian besar masih bersifat informal dan tidak terorganisir dalam kelembagaan yang kuat.

Sebagian pelaku lokal menyampaikan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan wisata, dan pelatihan atau pendampingan dari dinas bersifat insidental. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan, di mana manfaat ekonomi dari pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pihak luar (investor atau operator besar), bukan oleh masyarakat sekitar.

Hal ini menguatkan pernyataan Suansri (2003) bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan. Rendahnya literasi masyarakat terhadap potensi wisata dan minimnya dukungan pelatihan menjadi hambatan nyata dalam partisipasi aktif mereka.

### **Bentuk Kolaborasi Dinas dan Masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bentuk kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat di Pantai Carita masih bersifat sporadis dan belum melembaga. Kolaborasi lebih banyak terjadi dalam bentuk koordinasi menjelang event wisata tertentu atau dalam penanganan kebersihan saat musim libur. Belum adanya forum tetap atau kelembagaan bersama (seperti forum pengelola wisata atau koperasi desa wisata) membuat komunikasi dan penyelarasaran program berjalan tidak konsisten. Ini berbeda dengan model ideal kolaborasi yang disampaikan (Ansell, 2008), di mana proses kolaboratif yang efektif harus

mencakup partisipasi langsung, pengambilan keputusan bersama, dan adanya forum diskusi rutin.

Meskipun demikian, terdapat inisiatif dari beberapa komunitas lokal seperti Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) yang mulai terlibat dalam pengawasan wisatawan dan penyediaan informasi wisata. Inisiatif ini perlu didukung dan dikembangkan sebagai titik awal pembentukan kolaborasi yang lebih strategis dan terarah.

### **Hambatan dalam Kolaborasi**

Terdapat beberapa hambatan utama dalam membangun kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat, yaitu:

1. Kurangnya forum komunikasi yang permanen antara pemerintah dan pelaku lokal.
2. Minimnya literasi pariwisata masyarakat, terutama dalam manajemen usaha dan pelayanan wisata.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia Dinas Pariwisata dalam menjangkau seluruh potensi lokal.
4. Ego sektoral dan budaya birokratis, di mana keputusan masih didominasi oleh pihak dinas tanpa proses musyawarah terbuka.

Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses kolaborasi berjalan lambat dan kurang optimal, padahal semangat desentralisasi dan pembangunan partisipatif menuntut peran aktif dari semua pihak.

### **Peluang Pengembangan Melalui Kolaborasi**

Meskipun masih terdapat banyak tantangan, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi pariwisata membuka peluang keterlibatan lebih luas.
- Inovasi digital (seperti promosi melalui media sosial oleh komunitas lokal) dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan promosi.

- Potensi pembentukan kelembagaan desa wisata (pokdarwis, BUMDes wisata) yang mampu menjadi jembatan kolaboratif.
- Momen lonjakan wisata musiman (seperti saat Lebaran) dapat dijadikan titik tolak penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pengunjung, parkir, kebersihan, dan ekonomi lokal.

Jika peluang ini dapat difasilitasi dengan baik, maka akan tercipta pengembangan pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

## **PENUTUP DAN REKOMENDASI**

### **1. Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Pantai Carita**

Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang memiliki tanggung jawab utama dalam pengembangan destinasi wisata di wilayahnya, termasuk Pantai Carita. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, peran Dinas Pariwisata terlihat dalam beberapa aspek, yaitu: perencanaan program, penyediaan infrastruktur pendukung, promosi wisata, serta fasilitasi kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Namun, peran tersebut masih cenderung bersifat top-down. Banyak program yang dirancang tidak melalui proses konsultasi mendalam dengan masyarakat lokal, sehingga kerap kali kurang menyentuh kebutuhan dan potensi aktual di lapangan. Contohnya, meskipun telah dilakukan promosi melalui media sosial dan event daerah, belum ada pelibatan langsung kelompok masyarakat atau pelaku wisata lokal dalam perancangan konten maupun kegiatan promosi tersebut.

Padahal menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dalam kerangka collaborative governance, pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan publik. Artinya, Dinas Pariwisata perlu lebih membuka ruang dialog, mendorong peran aktif komunitas lokal, serta membangun kelembagaan kolaboratif agar pengembangan wisata tidak hanya dikelola pemerintah secara sepihak.

## **2. Peran dan Partisipasi Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal di sekitar Pantai Carita memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan wisata, baik sebagai pelaku usaha (homestay, kuliner, jasa sewa perahu), pengelola kebersihan lingkungan, hingga penjaga keamanan wisatawan. Namun demikian, partisipasi mereka sebagian besar masih bersifat informal dan tidak terorganisir dalam kelembagaan yang kuat.

Sebagian pelaku lokal menyampaikan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan wisata, dan pelatihan atau pendampingan dari dinas bersifat insidental. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan, di mana manfaat ekonomi dari pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pihak luar (investor atau operator besar), bukan oleh masyarakat sekitar.

Hal ini menguatkan pernyataan Suansri (2003) bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan. Rendahnya literasi masyarakat terhadap potensi wisata dan minimnya dukungan pelatihan menjadi hambatan nyata dalam partisipasi aktif mereka.

## **3. Bentuk Kolaborasi Dinas dan Masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bentuk kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat di Pantai Carita masih bersifat sporadis dan belum melembaga. Kolaborasi lebih banyak terjadi dalam bentuk koordinasi menjelang event wisata tertentu atau dalam penanganan kebersihan saat musim libur.

Belum adanya forum tetap atau kelembagaan bersama (seperti forum pengelola wisata atau koperasi desa wisata) membuat komunikasi dan penyelarasan program berjalan tidak konsisten. Ini berbeda dengan model ideal kolaborasi yang disampaikan Ansell dan Gash (2008), di mana proses kolaboratif yang efektif harus mencakup partisipasi langsung, pengambilan keputusan bersama, dan adanya forum diskusi rutin.

Meskipun demikian, terdapat inisiatif dari beberapa komunitas lokal seperti Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) yang mulai terlibat dalam pengawasan wisatawan dan penyediaan informasi wisata. Inisiatif ini perlu didukung dan dikembangkan sebagai titik awal pembentukan kolaborasi yang lebih strategis dan terarah.

#### **4. Hambatan dalam Kolaborasi**

Terdapat beberapa hambatan utama dalam membangun kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat, yaitu:

1. Kurangnya forum komunikasi yang permanen antara pemerintah dan pelaku lokal.
2. Minimnya literasi pariwisata masyarakat, terutama dalam manajemen usaha dan pelayanan wisata.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia Dinas Pariwisata dalam menjangkau seluruh potensi lokal.
4. Ego sektoral dan budaya birokratis, di mana keputusan masih didominasi oleh pihak dinas tanpa proses musyawarah terbuka.

Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses kolaborasi berjalan lambat dan kurang optimal, padahal semangat desentralisasi dan pembangunan partisipatif menuntut peran aktif dari semua pihak.

#### **5. Peluang Pengembangan Melalui Kolaborasi**

Meskipun masih terdapat banyak tantangan, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi pariwisata membuka peluang keterlibatan lebih luas.
- Inovasi digital (seperti promosi melalui media sosial oleh komunitas lokal) dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan promosi.
- Potensi pembentukan kelembagaan desa wisata (pokdarwis, BUMDes wisata) yang mampu menjadi jembatan kolaboratif.

- Momen lonjakan wisata musiman (seperti saat Lebaran) dapat dijadikan titik tolak penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pengunjung, parkir, kebersihan, dan ekonomi lokal.

Jika peluang ini dapat difasilitasi dengan baik, maka akan tercipta pengembangan pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C. &. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Emerson, K. N. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST). Bangkok.
- Radarbanten.co.id, 15April 2024, diakses pada 14 Juni 2025 tersedia di: [https://www.radarbanten.co.id/2024/04/15/450-ribu-wisatawan-padati-objek-wisata-pandeglang/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.radarbanten.co.id/2024/04/15/450-ribu-wisatawan-padati-objek-wisata-pandeglang/?utm_source=chatgpt.com)